



▶ PENUNJANG PARIWISATA

Haryadi Pastikan Perpanjangan Moratorium

UMBULHARJO—Pemerintah Kota Jogja memastikan akan memperpanjang moratorium izin pembangunan hotel.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

▶ PHRI DIY mengusulkan perpanjangan moratorium pembangunan hotel sampai 2021

▶ Banyak hotel yang dimiliki perorangan dengan maksud bisnis properti.

Berapa lama moratoriumnya masih akan menjadi kajian. "Diperpanjang itu pasti," kata Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti, saat dihubungi Rabu (27/9) sore.

Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, mengusulkan perpanjangan moratorium pembangunan hotel sampai 2021, mengingat tingkat hunian hotel di Kota Jogja masih di bawah 60%. Data PHRI periode Januari-Juli tahun ini tingkat hunian hotel bintang rata-rata masih di angka 58% dan hotel nonbintang 20%.

Haryadi mengatakan, usulan PHRI menjadi masukan yang perlu dikaji kembali bersama-sama. Pihaknya juga membutuhkan masukan dari berbagai pihak terkait dengan perpanjangan moratorium izin pembangunan hotel tersebut. "Saya ucapkan terima kasih atas masukan PHRI, nanti akan kami kaji," ujar Haryadi.

Yang pasti, ia menegaskan, bahwa saat ini pihaknya sudah tidak mengeluarkan izin baru untuk pembangunan hotel karena masih moratorium hingga akhir Desember nanti.

Tahun lalu, Haryadi Suyuti mengeluarkan Peraturan Wali Kota No.55/2016. Perwal tersebut untuk menggantikan Peraturan Wali Kota No.77/2013 tentang Moratorium Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel. Dalam peraturan lama, dinyatakan bahwa moratorium penerbitan IMB hotel ditetapkan sejak 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2015. Kemudian diperpanjang kembali setahun sampai 31 Desember 2016. Haryadi pun memperpanjang lagi moratorium hotel sampai akhir 2017.

Sebelumnya, Ketua PHRI DIY, Istidjab Danunagoro menatakn usulan meremajakan moratorium

Moratorium Hotel di Kota Jogja

Peraturan Wali Kota No.55/2016. Perwal tersebut untuk menggantikan Peraturan Wali Kota No.77/2013 tentang moratorium penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) hotel.

◉ Dalam peraturan lama, dinyatakan bahwa moratorium penerbitan IMB hotel ditetapkan sejak 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2015.

◉ Kemudian diperpanjang kembali setahun sampai 31 Desember 2016.

◉ Kemudian diperpanjang lagi sampai akhir 2017.

KAMAR HOTEL	TINGKAT HUNIAN
◉ Hotel berbintang 8.500-an	◉ Total di bawah 60%
◉ Kamar hotel nonbintang 13.500-an	◉ Hotel bintang 58%
	◉ Hotel nonbintang 20%

Sumber: dilatah

hotel di Kota Jogja perlu disamakan dengan Kabupaten Sleman sampai 2021, karena jumlah hotel sudah terlalu banyak. Sementara tingkat hunian masih di bawah rata-rata. Usulan PHRI ini akan disampaikan secara tertulis dalam waktu dekat.

Bisnis Properti

Wakil Ketua PHRI DIY, Herman Tony menambahkan, peningkatan jumlah kamar hotel saat ini tidak sebanding dengan tingkat kunjungan wisatawan yang menginap di hotel. Sehingga pembatasan pertumbuhan kamar hotel perlu dipertegas. Jumlah kamar hotel berbintang saat ini ada 8.500-an dan kamar hotel nonbintang sebanyak 13.500-an.

Ia berharap, Pemerintah Kota Jogja tidak hanya bicara moratorium, namun benar-benar tegas. Bila perlu, kata dia, hotel-hotel yang sudah memiliki izin sebelum moratorium berlaku pada 2014 lalu dibatasi. "Harusnya dibatasi misalnya setahun tidak dibangun maka harus mengajukan izin baru," ujar Herman.

Herman juga mengeluhkan bisnis perhotelan di Kota Jogja dan Sleman sudah mulai bergeser. Menurut dia, banyak hotel yang dimiliki perorangan dengan maksud bisnis properti. "Kalau hotel dalam selahun berganti-ganti owner itu bukan bisnis hotel namanya tapi bisnis properti," kata Herman.

1.			Lanjut
2.			tanggapi
3.			ketahui
4.			ters
5.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005